

Policy Brief

EDISI 3

EPICENTRUM OF GROWTH: PERCEPATAN EKONOMI PASCAPANDEMI DAN MEMBANGUN RESILIENSI EKONOMI KAWASAN

Penulis:

Nabilah Nur Abiyanti
Poppy S. Winanti

Penyunting:

Luqman-nul Hakim

Tata Letak:

Munawar W. Sugiyarto

Sumber gambar sampul:
<https://www.thejakartapost.com/adv/2023/01/30/president-jokowi-kicks-off-indonesias-asean-chairmanship-in-jakarta.html>

Dengan mengusung tema ‘*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*’ pada periode keketuaannya di ASEAN tahun 2023, Indonesia berupaya meneguhkan kembali peran dan relevansi ASEAN di tengah dinamika geopolitik dunia. Indonesia juga berambisi mendorong ASEAN sebagai sebuah kawasan yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran dan meningkatkan ketahanan ekonomi kawasan, dari segala potensi dinamika geopolitik dampak persaingan *major powers* di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik secara umum.

Seri *Policy Brief* FISIPOL UGM ini memeriksa isu-isu sentral dalam mewujudkan ASEAN sebagai ‘*epicentrum of growth*’, khususnya meliputi tiga isu utama: pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi, pengembangan ekonomi digital, dan ekonomi berkelanjutan. Di tengah upaya untuk mencapai target-target dalam tiga isutersebut, ASEAN menghadapi sejumlah tantangan baik kondisi internal maupun eksternal yang saling berkelindan. Tantangan internal yang dihadapi ASEAN bermuara pada disparitas kesiapan dan capaian pembangunan ekonomi antarnegara anggotanya. Sementara, tantangan eksternal berkaitan dengan perkembangan geopolitik mutakhir. Kapasitas kolektif untuk mengelola dinamika geopolitik demi stabilitas kawasan mutlak diperlukan. Di samping itu, negara-negara ASEAN—seperti halnya negara-negara lainnya di belahan bumi lain—masih menghadapi sejumlah tantangan karena perlambatan perkembangan ekonomi global pascapandemi COVID-19.

Mewujudkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi serta resiliensi ekonomi kawasan

Pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan yang belum pernah dihadapi banyak negara sebelumnya, sebagai konsekuensi dari pembatasan mobilitas manusia maupun pertukaran barang dan jasa antarnegara (Mas'udi & Winanti (eds), 2020). Restriksi tersebut menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi global secara signifikan dari 5,5% pada tahun 2021 menjadi 4,1% pada 2022 (*The World Bank*, 2022). Perlambatan perkembangan ekonomi global juga tampak dari meningkatnya jumlah orang yang kehilangan pekerjaan. Data dari *International Labour Organization* (ILO) (2021) menunjukkan bahwa dibandingkan tahun 2019, total lapangan kerja turun sebanyak 114 juta sebagai akibat dari pekerja yang menganggur atau keluar dari angkatan kerja. Periode antara tahun 2019 hingga 2020 juga mengindikasikan peningkatan jumlah angka pengangguran dari 191,93 juta menjadi 235,21 juta di dunia (O'Neill, 2023). Situasi yang sama juga dialami ASEAN, tingkat pengangguran di kawasan meningkat dari 2,6% pada tahun 2019 menjadi 3,6% pada tahun 2021 (*International Labour Organization*, 2021), tidak hanya itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi ASEAN juga menurun dari 4,4% pada 2019 menjadi 1,0% pada April 2020 (ASEAN, 2020b).



Dinamika politik global yang ditandai dengan krisis Rusia-Ukraina memperburuk proses pemulihan ekonomi pascapandemi yang tengah berlangsung. Sebelum terjadinya krisis, pertumbuhan ekonomi global telah lamban, dengan proyeksi penurunan laju pertumbuhan dari 5.5% pada 2021 menjadi 4.1% pada 2022. Dengan terjadinya krisis Rusia-Ukraina, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan menurun menjadi 3.2% pada tahun 2023 (Guénette, Kenworthy & Wheeler, 2022). Krisis Rusia-Ukraina, politik sanksi

ekonomi Amerika Serikat dan sekutunya juga menyebabkan terganggunya pasok rantai makanan maupun energi global. Kelangkaan komoditas yang disebabkan oleh krisis ini memengaruhi industri seperti makanan, konstruksi, petrokimia dan transportasi dalam skala global (Guénette, Kenworthy & Wheeler, 2022). Kenaikan harga komoditas tersebut berpengaruh besar terhadap ekonomi negara-negara Asia Tenggara, misalnya inflasi di Thailand yang mencapai 11,44% dan kenaikan harga transportasi, perumahan, listrik, bensin dan bahan bakar lainnya di Vietnam, Malaysia dan Indonesia (Jongwanich, 2022).

Kondisi-kondisi tersebut juga berdampak signifikan pada capaian-capaian integrasi ekonomi ASEAN, sebagaimana yang ditargetkan dalam cetak biru *ASEAN Economic Community (AEC) 2025*. Laporan *ASEAN Integration Report 2022* menunjukkan data yang tidak setara antara berbagai pilar maupun subpilar dari AEC, terutama dalam pilar pertama yang berkaitan dengan upaya mewujudkan ekonomi ASEAN yang lebih terintegrasi dan kohesif. Pandemi juga memperjelas kerentanan ekonomi ASEAN, memperluas ketimpangan dan kesenjangan serta kapasitas yang tidak merata di antara negara anggota ASEAN (Winanti, 2022). Dalam mengatasi krisis, baik akibat pandemi maupun geopolitik, sejumlah inisiatif di tingkat regional di bawah ASEAN telah coba diperkenalkan. Misalnya, melalui implementasi *ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF)* untuk memastikan keterbukaan pasar terhadap perdagangan dan investasi (ASEAN, 2022). ASEAN Economic Community juga berupaya untuk memperbarui *ASEAN Trade in Good Agreement (ATIGA)* yang dapat memperkuat ketahanan perdagangan dan rantai pasok intra-ASEAN dengan penggunaan efektif preferensi ATIGA per bisnis untuk mempromosikan integrasi kawasan. Terlebih, di tengah ketidakpastian pasar global, negara anggota ASEAN juga terus mengupayakan integrasi dengan ekonomi global melalui ratifikasi *Free Trade Agreements (FTA)* kawasan dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* (ASEAN, 2022).



Dalam keketuaan di ASEAN tahun 2023 ini, penting bagi Indonesia menunjukkan *leadership* dan komitmen yang kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, melalui sejumlah strategi. *Pertama*, meningkatkan kerja sama dan koordinasi di antara negara ASEAN. Untuk mendukung pemulihan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran serta tersedianya pengaman sosial di kawasan, tentunya dibutuhkan upaya bersama. Indonesia karenanya dapat mendorong pembentukan Satuan Kerja yang berfokus menangani satu isu berdasarkan keahlian dan memperkuat agenda kerja sama dengan pemangku kepentingan yang relevan (Rum et al., 2023). *Kedua*, penting bagi ASEAN untuk memperkuat ketahanan rantai pasok dan diversifikasi sumber energi untuk mengatasi gangguan pasokan dan harga komoditas yang tinggi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi produsen dan konsumen di negara anggota ASEAN.

Menguatkan sektor ekonomi digital: mengatasi kesenjangan digital menuju ekonomi digital yang terintegrasi

Pengembangan ekonomi digital menjadi salah satu pilar penting keketuaan ASEAN dalam mewujudkan *epicentrum of growth*. Sektor ekonomi digital telah menyumbang lebih dari 15% dari GDP dunia dan selama 10 tahun terakhir terus bertumbuh 2,5 kali lebih cepat dari GDP fisik (Hayat, 2022). Ekonomi digital juga memiliki peran sentral dalam meningkatkan GDP kawasan ASEAN, dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 6% per tahun dalam 10 tahun ke depan, yang menambahkan sekitar US\$1 triliun ke GDP kawasan (*World Economic Forum*, n.d.). Pendapatan perusahaan *start-up* di kawasan Asia Tenggara juga terus mengalami pertumbuhan yang pesat, melampaui *emerging market* lainnya dengan mencapai sekitar US\$8.2 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, tercatat setidaknya 30 perusahaan *start-up* di kawasan ASEAN mencapai status unicorn, dengan nilai valuasi mencapai US\$1 miliar atau lebih (Marsan, 2022). Besarnya kontribusi ekonomi digital bagi ekonomi di tingkat global termasuk di ASEAN, menyebabkan ekonomi digital menjadi sumber ekonomi masa depan.



Meskipun demikian, signifikansi sumbangan ekonomi digital bagi pembangunan ekonomi kerap terganjal persoalan kesenjangan digital di antara negara-negara ASEAN. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Oktober 2019, sekitar 50% dari total populasi ASEAN hidup di daerah pedesaan, yang menghadapi hambatan akses internet. Selain itu, 10% dari populasi dewasa di kawasan tersebut hidup dalam kondisi kemiskinan yang membuat mereka kesulitan mendapatkan akses internet dan perangkat komunikasi. Sementara, 5% dari populasi dewasa di ASEAN mengalami kesulitan membaca dan menggunakan teknologi komunikasi, dan sekitar 7% dari total populasi berusia 65 tahun atau lebih tidak terlalu familiar dengan teknologi baru (Low, Dujacquier & Kaur, 2021). Kesenjangan digital juga terjadi di kalangan perusahaan teknologi besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di antara negara-negara anggota ASEAN. Perusahaan teknologi besar memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan UMKM yang sebagian besar belum memiliki akses atau keterampilan digital yang memadai untuk memanfaatkan peluang dalam ekonomi digital (Bush & Najjar, 2022).

Sejumlah upaya telah dilakukan ASEAN untuk memitigasi dan mengatasi persoalan kesenjangan digital di kawasan. Berdasarkan laporan *ASEAN Digital Integration Index* (ADII), terdapat kebutuhan mendesak bagi ASEAN menciptakan peluang kerja di industri berbasis digital dan pengetahuan guna memastikan kesiapan digital tenaga kerja. Dalam kaitannya dengan perdagangan digital ASEAN yang masih di tahap awal, diperlukan kesepakatan di antara negara anggota ASEAN mengenai area prioritas perdagangan digital guna menyelaraskan dan mengoordinasi penggunaan teknologi digital dalam perdagangan (USAID & ASEAN, 2021). Sejak tahun 2000, ASEAN telah membantu negara kurang berkembang di kawasan dalam mengembangkan ekonomi digitalnya melalui kerangka seperti *Initiative for ASEAN Integration* (IAI) (Yang, 2023). Tidak hanya itu, *ASEAN Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) yang sedang dalam tahap studi –apabila telah berlaku– diproyeksikan dapat membangun ekosistem perdagangan digital di kawasan dengan menyelaraskan regulasi dan aturan perdagangan digital serta membangun kerja sama ekonomi digital menuju ekonomi ASEAN yang terintegrasi (Sefrina, 2023). Selain itu, guna mengatasi isu kesenjangan keterampilan dan literasi digital, *Go Digital ASEAN* telah diimplementasikan oleh Asia Foundation dan didukung oleh ASEAN. Program ini bertujuan memperluas partisipasi keterampilan digital di kawasan di kalangan individu dan komunitas. Program ini memberikan pelatihan keterampilan digital kepada pemilik bisnis UMKM di seluruh kawasan ASEAN (*The Asia Foundation*, n.d.)

Dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi digital di kawasan ASEAN dan mengatasi tantangan kesenjangan digital, diperlukan strategi kebijakan yang terkoordinasi. *Pertama*, ASEAN perlu menjalin kerja sama untuk mengembangkan sumber daya manusia digital yang inklusif. Untuk mencapai hal ini, diperlukan formulasi kebijakan yang mengedepankan edukasi dan peningkatan kapasitas keterampilan serta literasi digital bagi seluruh masyarakat. *Kedua*, diperlukan evaluasi perpajakan dan standardisasi nilai de minimis. Dengan menerapkan ambang batas dan standar yang seragam, lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital di kawasan dapat tercipta (Mohamad, 2022). *Ketiga*, diperlukan interoperabilitas sistem pembayaran yang apabila diimplementasikan dapat memastikan terintegrasi dan efisiennya sektor *e-commerce* di ASEAN. Selain itu, hal ini juga dapat memperkuat keunggulan kompetitif bagi UMKM lokal di pasar digital (Mohamad, 2022). *Keempat*, diperlukan kerja sama dan peningkatan kapasitas keamanan siber di tingkat kawasan. Hal ini meliputi pertukaran informasi penting, penyusunan protokol dan panduan penanganan insiden keamanan siber, koordinasi antarlembaga keamanan siber, dan pembentukan kerangka penyelesaian sengketa regional (Global-is-Asian, 2018 lihat juga Ha & Chuah, 2023).

Mewujudkan ekonomi berkelanjutan: ekonomi hijau dan ekonomi biru

Seperti halnya banyak negara lain di dunia yang tengah berjuang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pemenuhan ekonomi dan mengembangkan ekonomi yang lebih berkelanjutan, negara-negara anggota ASEAN juga menghadapi tantangan yang sama. Di tengah upaya tersebut, tingginya ketergantungan pada energi fosil bagi hampir semua negara anggota ASEAN menjadi persoalan tersendiri. ASEAN merupakan produsen batubara utama, dan beberapa negara anggota ASEAN juga merupakan produsen minyak dan gas alam (ACE, 2017). Prediksi menunjukkan bahwa sekitar 75% dari peningkatan permintaan energi di ASEAN hingga tahun 2030 akan berasal dari energi fosil, yang akan menyebabkan peningkatan emisi CO₂ sebesar 35% (IEA, 2022).



Namun, berdasarkan estimasi *International Renewable Energy Agency* (IRENA), kawasan Asia Tenggara memiliki potensi besar, khususnya dalam peningkatan lapangan kerja melalui transisi energi, yaitu sekitar 4,7 juta lapangan kerja baru dibandingkan kondisi bisnis seperti biasa (*Business As Usual*). Di sisi lain, sektor energi fosil yang kurang intensif tenaga kerja berpotensi kehilangan sekitar 0,3 juta lapangan kerja hingga tahun 2050 (ASEAN, 2020a). Oleh karena itu, mendesak bagi ASEAN untuk mengubah dan memikirkan strategi-strategi transformasi berkelanjutan, terutama dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi biru dan ekonomi hijau yang berkelanjutan, memperbarui *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA), yang akan memperluas kerja sama dalam beberapa area termasuk ekonomi hijau dengan tujuan untuk membangun ACFTA yang lebih inklusif, modern, komprehensif dan saling menguntungkan.

Berangkat dari kesadaran akan dampak dari perubahan iklim dan peluang yang muncul dari pemulihan pascapandemi, ASEAN memprioritaskan pengembangan ekonomi hijau dalam kerangka *ASEAN Comprehensive Recovery Framework* (ACRF). Dokumen ini mencakup sejumlah agenda, seperti, identifikasi langkah-langkah untuk mendukung investasi pada sumber listrik yang bersih, meningkatkan dan memperluas penggunaan transportasi yang lebih bersih, penggunaan *biofuel* berkelanjutan serta inovasi energi bersih, serta menciptakan pekerjaan ramah lingkungan (ASEAN, 2020a).



Selain fokus pada ekonomi hijau, ASEAN juga mengarahkan perhatian pada ekonomi biru. Pada tahun 2021, para pemimpin ASEAN mengadopsi deklarasi mengenai ekonomi biru di bawah keketuaan Brunei Darussalam. Adopsi deklarasi ini didorong oleh kesadaran atas tantangan yang dihadapi akibat perubahan iklim dan naiknya permukaan laut, serta peran penting laut dalam pertumbuhan ekonomi dan inovasi yang harus dijaga keberlanjutannya. Dokumen

ini mencakup sejumlah kerja sama ekonomi biru, seperti perlindungan lingkungan laut, Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IUUF), bioteknologi, pengembangan industri kelautan, pengelolaan sampah laut dan polusi plastik, ketahanan pangan, dan lain-lain (ASEAN, 2021).

Potensi besar energi baru terbarukan dan pertimbangan terhadap dampak krisis iklim serta kondisi geografis negara anggota ASEAN mendorong pentingnya ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, diperlukan *pertama*, kerja sama yang kuat dan pertukaran pengetahuan tentang koordinasi kebijakan untuk mempromosikan pekerjaan ramah lingkungan dan transisi yang adil. Hal ini juga melibatkan pengembangan mekanisme praktik terbaik dalam menghadirkan investasi publik dan swasta yang efektif untuk pembangunan berkelanjutan (ASEAN & ILO, 2021). *Kedua*, Indonesia perlu memastikan komitmen negara anggota menjadikan ekonomi biru sebagai prioritas pengembangan ekonomi masa depan, termasuk pendanaannya. Oleh karena itu, untuk menjamin keberlanjutan pendanaan, kerja sama sektor publik dan swasta perlu menjadi perhatian bersama, serta diperlukan kebijakan dan regulasi yang mendorong investasi dalam ekonomi biru (United Nations Environment Programme, 2022).



Penutup

Dalam upaya mewujudkan ASEAN sebagai *epicentrum of growth*, terdapat sejumlah tantangan yang perlu ditangani dengan langkah-langkah konkret. *Pertama*, pemulihan ekonomi pascapandemi harus menjadi prioritas utama dengan mengedepankan kerja sama dan koordinasi yang kuat antara negara anggota ASEAN. Selain itu, diperlukan upaya untuk memperkuat ketahanan rantai pasok dan melakukan diversifikasi sumber energi guna mengurangi kerentanan ekonomi terhadap faktor eksternal. *Kedua*, pengembangan ekonomi digital perlu diperkuat dengan mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan inklusi digital di seluruh kawasan ASEAN.



Ketiga, ASEAN dihadapkan pada ketergantungan energi fosil, meskipun di sisi lain, ASEAN juga memiliki potensi besar dalam transisi energi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan, meningkatkan kerja sama regional, dan mengidentifikasi langkah-langkah nyata untuk mendukung investasi pada tidak hanya pada sumber energi bersih, transportasi yang lebih bersih, namun juga inovasi energi bersih. Dengan komitmen yang kuat, ASEAN dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan mengoptimalkan potensinya sebagai *epicentrum of growth*. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menunjukkan *leadership* dalam memperkuat integrasi ekonomi ASEAN sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh negara anggotanya.

Referensi

- ASEAN. (2020a). *ASEAN Comprehensive Recovery Framework*. ASEAN.
- ASEAN. (2020b). *Economic Impact of COVID-19 Outbreak on ASEAN*. ASEAN.
- ASEAN. (2021). *ASEAN Leader's Declaration on the Blue Economy*. ASEAN.
- ASEAN. (2022). *JOINT MEDIA STATEMENT - THE 54th ASEAN ECONOMIC MINISTERS' (AEM) MEETING 13 – 15 September 2022, Siem Reap, Cambodia*. ASEAN.
- ASEAN Centre for Energy (Ed.). (2017). *The 5th ASEAN energy outlook, 2015-2040*. ASEAN Centre for Energy.
- ASEAN, & ILO. (2021). *Regional Study on Green Jobs Policy Readiness in ASEAN*. International Labour Organization.
- Bush, R., & Najar, H. (2022). *Digital Skills for Inclusive Growth: Reaching the Hard-to-Reach in Southeast Asia*. ASEAN.
- Guénette, J.-D., Kenworthy, P., & Wheeler, C. (2022). *Implications of the War in Ukraine for the Global Economy*. World Bank Group.
- Ha, H., & Chuah, C. K. P. (2023). *Digital economy in Southeast Asia: Challenges, opportunities and future development*. *Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal*. <https://doi.org/10.1108/SEAMJ-02-2023-0023>
- Hayat, Z. (2022, August 17). *Why digital trust is key to building thriving economies*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/agenda/2022/08/digital-trust-how-to-unleash-the-trillion-dollar-opportunity-for-our-global-economy/>
- IEA. (2022). *Southeast Asia Energy Outlook 2022—Key Findings*. IEA. <https://www.iea.org/reports/southeast-asia-energy-outlook-2022/key-findings>
- Institute for Democracy and Economic Affairs, & Friedrich Naumann Foundation. (2022). *ASEAN Integration Report 2022*. ASEAN Prosperity Initiative.
- International Labour Organization. (2021). *World Employment and Social Outlook: Trends 2021*. International Labour Organisation (ILO).
- Jongwanich, J. (2022, April 21). *Russia war on Ukraine threatens Southeast Asia's economic recovery*. East Asia Forum. <https://www.easiaforum.org/2022/04/21/russia-war-on-ukraine-threatens-southeast-asias-economic-recovery/>
- Low, J., Dujacquier, D., & Kaur, S. (2021). *Bridging the digital divide. Improving digital inclusion in Southeast Asia*. Roland Berger GmbH.
- Marsan, G. A. (2022, July 1). *Addressing the digital divide in ASEAN*. East Asia Forum. <https://www.easiaforum.org/2022/07/01/addressing-the-digital-divide-in-asean/>



- Mas'udi, W., & Winanti, P. S. (Eds.). (2020). *Tata kelola penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian awal* (1st ed.). Gadjah Mada University Press.
- Mohamad, J. (2022). Pillar 3: Enhanced Connectivity and Sectoral Cooperation. *In ASEAN Integration Report 2022*. ASEAN Prosperity Initiative.
- O'Neill, A. (2023, March 30). *Number of unemployed persons worldwide from 1991 to 2021*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/266414/unemployed-persons-worldwide/>
- Rum, M., Nandyatama, R. W., Santoso, Y. N., & Wicaksono, T. (2023). *ASEAN DITERPA KRISIS GANDA: KTT ASEAN 2023 HARUS HADIRKAN KEBIJAKAN BARU!* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Sefrina, M. (2023). Understanding the ASEAN Digital Economy Framework Agreement: A Means to Support ASEAN Integration. *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, 01*.
- The Asia Foundation. (n.d.). *Go Digital ASEAN*. The Asia Foundation. Retrieved June 13, 2023, from <https://asiafoundation.org/emerging-issues/go-digital-asean/>
- The World Bank. (2022, January 11). *Global Growth to Slow through 2023, Adding to Risk of 'Hard Landing' in Developing Economies*. The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/01/11/global-recovery-economics-debt-commodity-inequality>
- United Nations Environment Programme. (2022, December 7). *Financing the Sustainable Blue Economy in ASEAN Region: Opportunities and lessons learned from emerging initiatives*. United Nations Environment Programme. <https://www.unep.org/events/webinar/financing-sustainable-blue-economy-asean-region-opportunities-and-lessons-learned>
- USAID, & ASEAN. (2021). *ASEAN Digital Integration Index: Measuring Digital Integration to Inform Economic Policies*. ASEAN.
- Winanti, P. S. (2022). Sub-Pillar D - Financial Integration, Financial Inclusion, and Financial Stability. *In ASEAN Integration Report 2022*. ASEAN Prosperity Initiative.
- World Economic Forum. (n.d.). *Digital ASEAN*. World Economic Forum. Retrieved June 13, 2023, from <https://www.weforum.org/projects/digital-asean>
- Yang, A. T. H. (2023, April 20). *ASEAN's splintering digital economy governance | East Asia Forum*. East Asia Forum. <https://www.eastasiaforum.org/2023/04/20/aseans-splintering-digital-economy-governance/>